



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI IX DPR RI**

---

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	1. Ketua KSPI; 2. Ketua Migrant Care.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Rabu, 19 November 2014
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB - selesai
Acara	:	Masukan terkait permasalahan ketenagakerjaan.
Ketua Rapat	:	Dede Yusuf Macan Effendi, ST, M.Si/Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dra.Tri Udiartiningrum/Kabag Set Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1 Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir Anggota	:	A. 19 orang dari 33 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Ketua KSPI beserta jajaran; C. Ketua Migrant Care beserta jajaran.

**HADIR :**

**PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :**

1. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.Si.
2. Pius Lustrilanang, S.IP. M.Si,

**F.PDIP :**

-

**F.PG :**

3. Hj. Dewi Asmara, SH, MH

**F.P.GERINDRA :**

4. Khaidir
5. dr. H. Suir Syam, M. Kes.
6. Susi Marleny Bachsin, SE, MM.
7. Drg. Putih Sari.

**F.PD :**

8. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang
9. Siti Mufattahah, Psi.
10. Drs. Ayub Khan.
11. Drs. H. Zulfikar Achmad.
12. Hj. Aliyah Mustika, SE.

**F.PAN :**

13. Ir, H. A. Risiki Sadig.
14. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum.

**F.PKB :**

-

**F.PKS :**

15. Anshory Siregar, Lc
16. Drs. H. Hamid Noor Yasin, MM.

**F.PPP :**

-

**F.P.NASDEM :**

17. Irma Suryani Chaniago
18. Drg. Hj. Yayuk Srirahayu Ningsih, MM, MH.
19. Amelia Anggraini.

**F.P.HANURA :**

-

**ANGGOTA IZIN/SAKIT :**

1. Hj. Saniatul Lativa (F. PG)
2. Drs. H. Chaerul Anwar, Apt (F.PKS).

**UNDANGAN :**

1. Sekjen KSPI beserta jajaran
2. Migrant care

**KETUA RAPAT (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST / F.PD) :**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi, dan

Salam sejahtera bagi kita semua.

Teman-teman dari Anggota Komisi IX yang sudah hadir dan juga wabil khusus kepada Teman-teman dari Nasdem ataupun PPP yang hari ini akan hadir bersama dengan kita.

Yang saya hormati Teman-teman dari KSPI dan dari Migrant Care.

Terima kasih.

Pagi hari ini kita sudah berkumpul bersama dan sebelumnya saya memohon maaf karena hari ini mungkin Anggota belum semua hadir dan kita juga masih menunggu beberapa tamu-tamu yang lain. Oleh karena itu, izinkan saya untuk kita buka dulu lalu nanti kita skors ya sambil menunggu ya?

Baik.

**Bapak-bapak/Ibu-ibu,**

Atas seizin dari semua Teman-teman Anggota Komisi IX dan para tamu, maka sidang pagi hari ini, Sidang RDPU dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Migrant Care saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT : DIBUKA PKL 10.30 WIB)**

Dan sesuai dengan Tata Tertib karena kita masih menunggu beberapa teman dan anggota-anggota yang lain juga para tamu undangan, untuk itu kami berikan waktu untuk kita skors 5 menit, ya kita skors 5 menit dahulu sambil nanti kita lanjutkan kembali.

Setuju?

**(RAPAT : DISKORS)**

Baik.

**Bapak-bapak/Ibu-ibu yang saya hormati,**

Kita sudah melewati 5 menit, skors kita cabut, setuju?

**(SKORS RAPAT DICABUT)**

Baiklah.

Sebelum membuka RDPU pada pagi hari ini, perlu kami sampaikan bahwa daftar hadir telah ditandatangani oleh 9 Anggota Komisi IX dari 5 Fraksi dan karena di dalam Tata Tertib RDPU tidak, berarti tidak harus 2 Pimpinan maupun harus kuorum karena sifatnya adalah mendengarkan masukan dari umum, maka kami nyatakan sidang kita teruskan dan mengenai waktu pukul rapat, kita start dari pukul 10.30 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

Apakah bisa disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah.

**Bapak-bapak/Ibu-ibu,**

Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Teman-teman dari KSPI yang sudah hadir dan juga Migrant Care. Inti daripada undangan kita pada pagi hari ini adalah kami ingin mendengarkan beberapa masukan-masukan dari KSPI sesuai dengan jadwal audiensi yang diberikan dan kami adalah dari Anggota Komisi IX yang umumnya adalah rata-rata baru bertugas di Komisi IX. Disini ada kawan-kawan kami

yang sudah hadir ada Pak Utomo, beliau adalah Mantan Anggota, Pak Utomo benar ya, oh ganti, Pak Chaidir, ini mantan Anggota DPRD dan lalu dari Fraksi Gerindra, lalu kemudian ada Pak Ayub Mantan Anggota DPRD juga dari Jember, Pak dr. Suwir, ini mantan bupati dari, maaf mantan walikota dari Sumbar, Sumatera Barat, lalu kemudian ada Pak Zulfikar ini Mantan Bupati dari Jambi, Bungo, lalu ada Ibu Donna, Ibu Donna ini dulu incumbent bukan Bu? Belum ya. Ya Ibu Donna ini dari Bengkulu, Politisi juga dan Ibu Irma, Ibu Irma dari Nasdem, Beliau mungkin teman-teman dari KSPI, jadi sudah paham sekali permasalahan perburuhan. Kemudian ada Pak Ali Taher dari Fraksi PAN. Beliau adalah Mantan Direktur Rumah Sakit, dan saya sendiri Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat. Saya mantan artis sajalah Pak.

Terima kasih sekali lagi.

Kita mendengar beberapa isu yang cukup besar terkait masalah perburuhan tentunya dan juga masalah migrant care, masalah pekerja-pekerja kita yang harus perlu mendapatkan perlindungan. Untuk itu, kami mengharapkan Bapak-bapak/Ibu-ibu bisa memberikan kami suatu pencerahan, sebuah wawasan baru terkait masalah perburuhan dan kami berikan waktu seluas-luasnya nantinya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mempersentasikan dan langsung juga kalau ada isu-isu terkait naiknya BBM sekarang ini silakan saja Bapak sampaikan dan ini akan menjadi catatan bagi kami.

Oh ini ada 1 lagi Pak Hamid dari Fraksi PKS, Anggota DPRD-nya dulu, Anggota DPRD juga.

Sementara baru ini, mungkin dalam waktu ke depan akan lebih banyak lagi yang datang.

Kami persilakan Saudara Sekjen untuk sebelumnya memperkenalkan dahulu kepada teman-teman lain sambil menunggu mungkin Pak Iqbal akan hadir disini untuk memulai paparan dari, KSPI dulu atau Migrant Care dulu, terserah Bapak, KSPI dulu, KSPI dulu ya.

Kami persilakan Pak.

Silakan.

#### **SEKJEN KSPI (MUHAMAD RUSDI):**

Terima kasih Pak Dede Yusuf selaku Ketua Komisi IX DPR RI yang kami hormati.

Inilah pertemuan kita yang kedua dengan Pak Dede Yusuf. Sekitar 2 minggu lalu kita sudah bertemu juga dengan Pak Dede beserta Wakil Ketua DPR. Sebelumnya, kami ucapkan selamat bertugas kepada seluruh Anggota DPR RI Komisi IX yang baru terpilih semoga kita bisa bersinergi dalam rangka untuk mensejahterakan buruh dan juga rakyat Indonesia.

#### **Bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan juga Ibu-ibu sekalian,**

Nama saya, Muhammad Rusdi, Sekjen dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dimana Bung Sahid Iqbal sedang on the way, Beliau adalah Presiden dari KSPI. Bersama saya hadir Pak Sofyan Abdul Hakim, Beliau adalah Ketua Umum dari Federasi Siap Bekerja Pariwisata Reformasi dan juga salah satu Wakil Presiden KSPI bidang Pengupahan adalah Zuki Azhari Ketua Umum dari Federasi Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan Reformasi dan juga Anggota dari Majelis Nasional KSPI, kemudian Pak Agus Toniman Ketua Umum dari Federasi Percetakan Media Penerbitan, KSPI juga, dan juga wakil ketua majelis nasional, mantan Anggota DPR juga dia ini, kemudian ada Mbak Lita mitra kita dimana KSPI bersama dengan beberapa elemen serikat pekerja tergabung dalam yang namanya Komite Aksi Pekerja Rumah Tangga dalam rangka pengawalan terhadap RUU PRT (Pekerja Rumah Tangga) bukan Pembantu. Jadi kita ada istilah PRT itu Pekerja Rumah Tangga. Kemudian yang paling ujung adalah Bung Yudi Winarno

Bendahara FSPMI Pekerja Metal dan juga penanggung jawab untuk isu outsourcing kita di KSPI dan juga aktif di GEBER BUMN (Gerakan Bersama BUMN) yang sedang mendorong kasus-kasus di outsourcing di BUMN. Kemudian di belakang Ribut Santosa dari Federasi Serikat Pekerja Industri Semen, dari Indo Semen kebetulan. Kemudian Pak Pak Effendi Idris dari Federasi Pariwisata, kemudian Ibu Pegi juga Federasi Pariwisata dan Ibu Ani Simanjutak dari Federasi Kimia Energi Pertambangan dan yang baru datang juga ini Teman-teman dari Federasi Pariwisata.

Jadi KSPI itu ada 9 Federasi termasuk nanti SPN (Serikat Pekerja Nasional) dengan total anggota, termasuk dengan PGRI yang tercatat kita punya Anggota 1,8 juta, yang terbesar masih PGRI sekitar 900 ribu, kemudian SPN 798 ribu, Federasi Metal itu 225 ribu, kemudian Kimia Energi Pertambangan 150 kemudian saya dari Aspec Indonesia sekitar 80 ribuan dan yang lain-lain.

### **Bapak/Ibu sekalian,**

Senang sekali kita di awal kerja dari Komisi IX ini bisa sharing, bukan pencerahan Pak karena saya yakin yang ada di depan kami ini adalah semua adalah mantan-mantan pejabat di daerah yang tentunya sudah sangat paham. Nah kami datang kesini ingin sharing dan juga ingin menyamakan persepsi tentang bagaimana konsepsi sejahtera, karena buruh Indonesia perjuangannya adalah tujuannya kesejahteraan buruh dan juga rakyat. Nah ini yang juga kita ingin sharing.

Nah mungkin lanjut.

Nah kita bicara sejahtera, bicara buruh di Indonesia kita punya trauma persepsi tentang bagaimana buruh Indonesia di masa lampau, di masa VOC, Belanda, kemudian Jepang, kita pernah yang mengalami sistem kerja tanam paksa, kerja paksa dan Romusha yang pada prinsipnya sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sedang dialami hari ini status kerja yang tidak jelas, kemudian juga eksploitasi tenaga yang luar biasa dan upah yang tidak jelas, sesungguhnya sama. Nah ini kami ingin memulai, mungkin bisa sampaikan, kita ingin memulai, ini ada kaitan dengan investasi atau yang bercodok kolonialisasi. VOC sesungguhnya adalah perusahaan, dia datang Tahun 1602, kemudian 1799 bangkrut, kemudian Kerajaan Belanda mengambil alih dan lain-lain, kemudian Jepang masuk dan lain-lain.

Nah kami ingin memastikan ini bahwasanya apa yang sedang kami perjuangkan dan tantangan yang kami hadapi pada hari ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh leluhur kita, oleh founding father kita, dari Abad XVI, XVII, XVIII, XIX, kemudian terbentuknya Serikat Islam, terbentuknya Serikat Pekerja Penggadaian, Serikat Pekerja Kereta Api dan lain-lain, muncul HOS Tjokrominoto, muncul Soekarno, muncul Agus Salim, kemudian muncul Muhammad Hatta dan lain-lain, muncullah kemudian Republik Indonesia. Ini suatu bagian yang tidak terpisahkan. Ini awal saya ingin coba buka ini, bahwasanya memang sesungguhnya investasi yang hadir ke Indonesia itulah berkedok kolonialisasi. Kita punya teman-teman yang bekerja di Indo Semen, kita paham di Indo Semen pabriknya luar biasa luas, 6 kecamatan dari ujung Jagorawi sampai ujung Hambalang dan lain-lain, Freeport dan itu juga bagian dari aktivis yang sedang memerjuangkan tentang kesejahteraan, sehingga tema kesejahteraan kita dalam konteks buruh bukan hanya bicara kita minta upah kepada Pengusaha saja, tetapi berbicara sejahtera adalah bagaimana buruh bisa hidup sejahtera.

Lanjut mungkin Bung Hakim.

Ya, kita punya ... yang luar biasa. Ini sebagai pengantas saja.

Lanjut.

Ini adalah peta-peta yang sudah tersebar di dunia maya, berasal dari BP Migas tentang semua daerah dari Aceh sampai Papua sudah dipeta-petakan, ada yang bermain di

perkebunan, ya teh, kopi, sabun dan lain-lain, minyak sawit, ada yang menguasai pertambangan, ada yang menguasai perdagangan dan lain-lain.

Lanjut.

Nah sehingga menjadi sebuah pertanyaan kritis kami kenapa Indonesia negara kaya tetapi buruh dan rakyatnya miskin. Pertanyaannya apakah kami miskin? Karena kami miskin, karena kami malas tidak, apakah kami bodoh juga tidak, apa kami tidak bekerja tidak, kami bekerja tetapi masih miskin, apakah negara kita miskin tidak juga tetapi miskin kami adalah karena dimiskinkan, diciptakan, direkayasa, inilah yang menjadi pandangan kami, ini yang dari awal kami bukan ingin pencerahan tetapi ingin suatu persepsi. Inilah pandangan kami, karena kita berjuang sudah ribuan kali, sudah aksi tetapi juga terbentur dengan sebuah tembok besar dengan sebuah sistem politik dan ekonomi sistem bisnis yang memang membuat kami menjadi tidak sejahtera.

Lanjut Pak.

Nah kami sendiri dalam konteks menuju kesejahteraan, ada 4 tema sentral. Pertama, perjuangan upah layak. Yang pertama adalah upah layak ini terkait dengan upah minimum yang hari ini sedang kami perjuangkan, hari ini sedang aksi kami di Banten kemudian juga di Kabupaten Bekasi, kemudian kemarin juga aksi di Bintan dan di Batam, 13 Anggota Kami di Bintan dipukuli oleh Polisi, babak belur, 3 masuk rumah sakit, beberapa juga masih dirawat di Bintan di Kepulauan Riau dan juga besok Teman-teman Jakarta katanya Bu Irma menutup pelabuhan di tempat Ibu Irma bekerja Hari Kamis. Sekarang, sedang terjadi sebuah pergolakan upah minimum belum selesai.

Yang kedua adalah perjuangan jaminan sosial. Jadi ingin sampaikan kepada teman-teman Anggota Dewan, bahwasanya sejahtera itu bukan hanya upah, tetapi upah kemudian jaminan sosial. Di Indonesia Jaminan Sosial dalam Undang-Undang SJSN baru ada 5 program. Sebelumnya Undang-Undang Jamsostek 4 program. Insya Allah Tahun depan Juli, 1 Juli 2015 itu tambah 1 program jaminan pensiun. Jadi per 1 Juli 2015 Insya Allah kalau berjalan lancar, skemanya juga jelas, itu pegawai swasta akan mendapatkan program jaminan pensiun, bukan hanya PNS per 1 Juli 2015. Sampai hari ini RPT-nya belum selesai, belum disepakati. Nah di luar 5 itu, standard ILO itu ada 9 program. Jadi saat ini Indonesia sudah ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, ini yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya Undang-Undang Jamsostek cuman 4, kemudian SJSN mengintegrasikan jaminan sosial Indonesia termasuk jaminan kesehatan yang tadinya ada di Askes, Taspen, Asabri, sekarang menjadi SJSN, turunannya adalah Undang-Undang BPJS, BPJS Kesehatan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Di BPJS Ketenagakerjaan ini ada 4 program yang nanti akan berlaku 1 Juli 2015. Nah ada 4 program lagi standard ILO yang belum berlaku di Indonesia, kita harap ini bisa segera nanti bisa jalan, mungkin bisa langsung Bung Hakim, terus.

Nah ini standard ILO 9 program. Yang belum adalah jaminan kehamilan, kemudian jaminan kecacatan, yang ketiga jaminan membesarkan anak. Jadi kalau di luar negeri itu tidak perlu lagi ada istilah mau ngapain lembur buat susu anak, tidak perlu lagi karena buat susu anak sudah ditanggung oleh negara, ada rekening khusus buat Ibu-ibu dan terakhir adalah jaminan pengangguran. Di Vietnam dan di Eropa, orang nganggur itu dicariin kerja, kalau tidak dapat kerja juga dari 6 bulan sampai setahun negara yang memberikan subsidi jaminan pengangguran sekitar 60-70% gaji terakhir. Di luar negeri ada atau tidak outsourcing? Ada outsourcing, tetapi ketika mereka menganggur negara yang kemudian bertanggung jawab. Nah di Indonesia mau tidak, mau kerja mau nganggur, mau sakit, mau tidak dirawat, mau ditolak rumah sakit itu dibiarkan saja.

Nah inilah kira-kira parameter kedua apa yang mau kita kejar terkait dengan kesejahteraan, mungkin balik lagi ke step awal. Nah plus ada 3 program yang ingin coba kita kejar yaitu pendidikan gratis, kemudian juga kesehatan sudah termasuk juga

transportasi publik murah, juga negara fasilitas publik yang non ac itu bisa gratis. Jadi ini yang mau kita coba samakan persepsi bagaimana sejahtera, upah atau pendapatan yang layak, kemudian jaminan sosial. Nah bicara jaminan sosial, ini bukan hanya untuk buruh tetapi untuk rakyat semuanya, bagaimana APBN dan lain-lain, tinggal bagaimana skemanya. Kalau di Negara Eropa itu ada yang mengambil dari pajak, ada yang mengambil dari sebagian dari iuran. Di Indonesia, sistem BPJS itu adalah Asuransi Sosial. Kita menyempurnakan konsepsi lama jamsostek dan yang lainnya. Kalau Jamsostek dulu BUMN, dulu Jamsostek bukannya disumbang oleh negara tetapi bayar deviden kepada negara tetapi hari ini melalui Undang-Undang BPJS Kesehatan, negara yang melakukan, memback-up kalau nanti kurangnya dananya, negara yang memback-up.

Yang ketiga, kita sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya perekonomian disusun sebagai atas usaha bersama, kekeluargaan. Nah hari ini Indonesia kaya tetapi yang menikmati adalah perusahaan-perusahaan besar. Investasi datang tetapi yang menikmati adalah perusahaan-perusahaan besar. Ada sebuah terjadi ketimpangan kesejahteraan. Kalau kita mengenal ada istilah demokrasi politik, belum terjadi demokrasi ekonomi, belum terjadi sharing kesejahteraan, sharing ekonomi belum ada, makanya ... kita makin tinggi 0,43. Nah kita berharap besar ke depan sesuai amanah, konsepsi dari Muhammad Hatta, koperasi-lah yang harus dibangun. Di banyak negara, koperasilah dan bahkan ada Rabo Bank dari Belanda itu pemiliknya Koperasi, beberapa perusahaan-perusahaan besar di Belanda, Inggris, Eropa pemiliknya koperasi. Nah ini kita berharap besar koperasi ke depan menjadi sebuah acuan. Bahkan di Anggota kami di Indo Semen misalkan itu mereka sudah punya SPBU 2, di Kayaba di Bekasi mereka sudah punya pabrik. Jadi besar dan asetnya rata-rata banyak yang sudah di atas milyaran. Nah ini yang sekali lagi kita ingin bagaimana marwah ekonomi kita nanti bukan ke atas tetapi bawah, grassroad-lah yang akan memiliki. Bahkan dapen-dapen pensiun, dana pensiun kami itu rata-rata itu mereka seperti SPBU mereka saldonya itu atau asetnya sudah mencapai 6,8 Trilyun. Jadi jangan diremehkan. Eropa itu negara, Eropa Barat mereka sejahtera, Finlandia, Denmark, Swedia bisa sejahtera tingkat kesejahteraan pendidikan sangat tinggi bukan karena kaya tetapi mereka memmanage uang rakyatnya dengan baik, uang buruhnya dengan baik. Nah inilah yang belum dioptimalkan oleh negara ini. Kalau misalkan BKPM perelease akhir tahun lalu mengatakan investasi masuk ke Indonesia, totalnya adalah 393 Trilyun. Itu sudah luar biasa. Nah kami hitung dengan potensi 44 juta pekerja formal, seandainya taflet, ada gerakan nabung, muda-muda kan investasi melalui koperasi dan bank buruh misalkan, di India juga dan di Jepang mereka serikatnya juga punya bank juga begitu, 1 juta x 12 bulan x 40 juta saja misalkan, itu terkumpulkan 480 Trilyun, lebih besar dari investasi yang masuk, dari target BKPM 2014. Ini sangat dasyat. Nah inilah yang kita ingin sama-sama, punya persepsi yang sama bagaimana desain bisnis, desain ekonomi, desain pembangunan, yang bertumpu kepada rakyat, kami sanggup, tetapi bagaimana mekanisme, bagaimana keberpihakan dan bagaimana grand design.

Yang keempat adalah ini suka/tidak suka bahwasanya kita miskin karena APBN kita dikorup yang juga adalah bahwasanya hari ini kalau kata Refision Bahir, tema sentral kesejahteraan, bicara tema kesejahteraan, bicara solusi kesejahteraan, kalau tidak memulai, tidak mendasarkan bahwasanya hari ini kita pergi saja, maka itu omong kosong, maka suka/tidak suka hari ini kita dari gerakan buruh merasa kita masih terjajah secara ekonomi.

Itu perspektif dari kami dari Gerakan Buruh, karena kami sudah aksi kemana pun tetap saja tembok besar dan lain-lain.

Mungkin lanjut Pak Hakim.

Ya lanjut terus.

Nah ini hak konstitusi yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, dari mulai hak mendapat pekerjaan layak, penghidupan yang layak, hak mendapat jaminan sosial, hak mendapat jaminan kesehatan, termasuk hak untuk pendidikan dan hak untuk mendapat perumahan. Sekarang ini di Jakarta kalau upahnya tidak 10 juta, sudah tidak mungkin bisa beli tanah atau beli rumah di Jakarta, apalagi dengan UMP cuman 2,4, cuman naik 2,7 juta, tidak mungkin bisa punya rumah di Jakarta tidak mungkin termasuk juga di Bekasi, semua tanah-tanah Bekasi Karawang itu sudah punya Agung Sedayu, sudah punya Lippo, Podomoro, Sinar Mas dan lain-lain, sudah tidak mungkin Pak, di Jabodetabek sudah tidak mungkin, kita sudah paling sudah Karawang dan lain-lain. Ini yang harus diperhatikan, jadi tidak mungkin. Mau 5 juta pun UMP tidak mungkin kita bisa menyicil, karena cicilan itu sudah hampir 1 juta ke atas, UMP kita cuman 2,4 sudah buat makan sudah habis. Nah ini yang sekali lagi yang PR yang makin berat, yang Jakarta akhirnya rumah, rumah orang tua dipetak-petak yang ada, makin sempit tetapi tidak mungkin ada terjadi sebuah pertumbuhan perumahan-perumahan baru, perumahan sederhana di Jakarta, Jabodetabek sudah tidak mungkin, makanya kami juga ingin mengingatkan bagaimana tanggung jawab negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 bahwasanya hak pendidikan, hak kesehatan juga sama dengan hak perumahan. Nah itu, dan itu yang terakhir adalah bagaimana amanah Undang-Undang 1945 tentang ekonomi yang harus dibangun tentang koperasi dan lain-lain.

Lanjut.

Nah ini sebagai pembuka awal tentang bagaimana problem kesejahteraan yang kami hadapi bahwasanya sesungguhnya kami tidak melihat negara hadir dalam proyeksi kesejahteraan di Indonesia terutama dengan Buruh. Nah secara teknis, secara spesifik kalau bicara buruh tadi ada upah, kemudian jaminan sosial, kemudian juga ada bicara tentang hubungan kerja dalam hal ini adalah outsourcing termasuk juga nanti adalah teman-teman PRT dan juga buruh migrant. Nanti buruh migrant, mungkin teman-teman dari Migrant Care, kami disini akan coba sharing tentang upah, kemudian juga outsourcing dan juga jaminan sosial, pasti nanti teman-teman dari PRT.

Terkait dengan upah, hari ini upah Indonesia di Jakarta itu Jabodetabek 2014 2,4 juta. Itu standard jabodetabek tertinggi, jabodetabek dan batam. Kalau di Jawa Tengah itu kami menyebut upah terendah sedunia terutama di Banjar Negara, Upah Indonesia itu masih Rp910.000,00. Itu terendah Jawa Tengah. Ada lagi Cilacap Barat, kemudian juga di kampungnya Pak SBY di Pacitan, kalau di Jabar itu terendah di Majalengka dan lain-lain itu tidak jauh antara 900 ribu-1 juta. Pertanyaannya, mana mungkin dengan upah 900 ribu itu buruh bisa sejahtera, tidak mungkinlah, kami menyebutnya kami bekerja tetapi kami masih miskin. Nah di Jakarta, problemnya adalah untuk tahun ini saja itu UMP yang dibutuhkan Jakarta Ahok kemarin cuman naiki 250 ribu saja atau sebesar 10%. Di Kota Bekasi naik hampir 500 ribu. Di Jawa Timur, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan dan Gresik sama naiknya 500 ribu. Nah problemnya adalah kenapa bisa beda? Nah Jakarta termasuk adalah kita secara ekonomi lebih tinggi dari Bangkok, dari Philipina. Di Philipina, UMP-nya sudah 3,6 juta, di Bangkok sudah hampir 3,2 juta. Kita tidak bicara Taiwan, Hongkong, TKI disana sudah hampir digaji 9 juta di Taiwan, di Hongkong bisa belasan, di Korea bisa belasan, di Jepang mereka 25 juta termasuk di Australia kalau di kurs rupiah itu UMP di Australia itu sudah hampir 40 juta, kenapa orang Australia banyak di Bali karena walaupun Supir mereka juga kan, karena 40 juta mereka saving per bulan 10 juta, per tahun mereka bisa saving 120 juta, di Bali jadi raja minyak disana, tetapi orang Jakarta sendiri tidak mungkin ke Bali. Nah ini problemnya adalah ada sebuah sistem pengupahan yang bermasalah. Nah ini beberapa regulasi yang membuat upah kita menjadi rendah, ada tentang Permenakertrans tentang KHL No. 13/2012 jumlah itemnya masih 60 item, sedangkan penelitian dari suatu lembaga riset itu kalau untuk keluarga, jadi UMP itu diputuskan berdasarkan survei KHL. KHL itu adalah Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Lajang. Jadi yang